LAMPIRAN
**LAPORAN TAHUNAN KPK**
**2018**

# BIRO HUKUM

## PENGUATAN YURIDIS

| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| 1 | Partisipasi dalam Penyusunan Rancangan Legislasi / Regulasi Eksternal | 1. Penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) tentang Penanganan Aset Tindak Pidana.<br>2. Penyusunan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).<br>3. Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RKUHAP).<br>4. Penyusunan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang Berlaku pada KPK<br>5. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan<br>6. Reviu / Pelaksanaan Pengharmonisan, Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.<br>7. Pembahasan RPP Pengendalian Gratifikasi.<br>8. Penyusunan RPP Pelayanan Tahanan<br>9. Penyusunan RUU Perampasan Aset Tindak Pidana.<br>10. Penyusunan Perpres Stranas (Pembahasan bersama K/L/*Stakeholder*)<br>11. Penyusunan RPP Tindak Pidana Pencucian Uang dan Teroris.<br>12. Penyusunan RUU tentang Ekstradisi. |
| 2 | Rancangan dan Harmonisasi Peraturan (regulasi) internal | 1. Peraturan Komisi tentang Revisi Peraturan Komisi tentang Tugas Belajar dan Izin Belajar (diundangkan No. 01 Tahun 2018)<br>2. Peraturan Komisi tentang Tunjangan Hari Tua Penasihat dan Pegawai (diundangkan No. 02 Tahun 2018)<br>3. Peraturan Komisi tentang Organisasi dan Tata Kerja KPK (diundangkan No. 03 Tahun 2018)<br>4. Peraturan Komisi tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (diundangkan No. 04 Tahun 2018)<br>5. Peraturan Komisi tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 06 P.KPK Tahun 2006 tentang Peraturan Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi (diundangkan No. 05 Tahun 2018)<br>6. Peraturan Komisi tentang Arsip Vital (diundangkan No. 7 Tahun 2018).<br>7. Peraturan Komisi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tugas Belajar (diundangkan No. 8 Tahun 2018)<br>8. Peraturan Komisi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Individu Penasihat dan Pegawai (diundangkan No. 9 Tahun 2018)<br>9. Peraturan Komisi tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Insentif Kinerja Bagi Penasihat dan Pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi (diundangkan No. 10 Tahun 2018)<br>10. Peraturan Komisi tentang Sistem Penilaian bagi Penasihat dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (diundangkan No. 11 Tahun 2018) |





| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| | | 11. Peraturan Komisi tentang Pembentukan Produk Hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (proses harmonisasi di Kemenkumham Ditjen PP)<br>12. Peraturan Komisi tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan KPK (penyusunan)<br>13. Peraturan Komisi tentang Mutasi (proses penyusunan)<br>14. Peraturan Komisi tentang Kepegawaian (penyusunan)<br>15. Peraturan Komisi tentang Bisnis Proses (penyusunan)<br>16. Peraturan Komisi tentang Perubahan Peraturan Komisi Nomor: 2 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan Penerimaan Gratifikasi Oleh Pimpinan, Penasihat dan Pegawai KPK (penyusunan)<br>17. Peraturan Komisi tentang Pakaian Kerja di Lingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 4 Tahun 2015. (proses)<br>18. Peraturan Komisi tentang Tata Cara Penetapan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (penyusunan)<br>19. Keputusan Pimpinan tentang Penetapan Peta Proses Bisnis di Lingkungan KPK<br>20. Keputusan Pimpinan tentang Penetapan dan Pengaturan Unit Kerja Koordinasi Wilayah<br>21. Keputusan Pimpinan tentang Cetak Biru Manajemen Sumber Daya Manusia KPK Tahun 2018-2022<br>22. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 14 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa RA.<br>23. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 15 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa SO.<br>24. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 16 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa CS.<br>25. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 153 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa SA.<br>26. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 156 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa HK.<br>27. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 191 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa BDU.<br>28. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 192 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa EWD.<br>29. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 1118 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa HH. |

| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| | | 30. KEP Pimpinan KPK tentang Penetapan Peta Bisnis Proses di Lingkungan KPK.<br>31. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 1941 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa RY.<br>32. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 1868 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa SP.<br>33. KEPUTUSAN PIMPINAN KPK NOMOR 2056 TAHUN 2018 tentang Penetapan Saksi Pelaku yang Bekerjasama Dalam Tipikor a.n. Terdakwa HPU. |
| 3 | Rancangan Perjanjian / MoU, Peraturan bersama dan Pakta Integritas | 1. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Andalas<br>2. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Lampung<br>3. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Sam Ratulangi<br>4. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Tomakaka<br>5. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Palangkaraya<br>6. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Tanjung Pura<br>7. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Syiah Kuala<br>8. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Jambi<br>9. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa<br>10. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Bengkulu<br>11. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Mulawarman<br>12. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Undana<br>13. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan STIH Manokwari<br>14. 1PKS Nomor 127 Tahun 2018 antara KPK-POLRI-KEJAKSAAN tentang Penanganan Tipikor Dalam Pelaksanaan Pilkada<br>15. Nota Kesepahaman (MoU) KPK – DJKN Kemenkeu tentang Lelang Barang Sitaan Rampasan Negara dan Gratifikasi<br>16. PKS antara KPK – Kodam Jaya tentang Pinjam Pakai Sebagian Tanah dan/atau bangunan TNI AD<br>17. Nota Kesepahaman KPK dengan LPSK tentang Kerjasama Dalam Rangka Penegakan Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br>18. Nota Kesepahaman antara KPK dengan KY tentang Kerjasama Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br>19. MoU antara KPK dengan STT Gereja Metodis Indonesia tentang Kerjasama dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi |



KPK
Komisi Pemberantasan Korupsi

| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| | | 20. MoU antara KPK dengan Kemenkumham tentang Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi<br>21. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Gorontalo<br>22. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Mataram<br>23. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Ternate<br>24. Amandemen Perjanjian Kerjasama antara KPK dengan Universitas Bangka Belitung<br>25. MoU antara KPK dengan Kementerian Keuangan tentang Kerjasama Dalam Upaya Pemberantasan Tipikor dan Tindak Pidana Lainnya<br>26. Perpanjangan MoU antara KPK dengan MACC Malaysia tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<br>27. MoU antara KPK dengan Universitas Mahendradatta Bali tentang Kerjasama Dalam Upaya Pencegahan Tipikor<br>28. Nota Kesepahaman antara KPK dan Serious Fraud Office Selandia Baru tentang Kerjasama dalam Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi<br>29. Nota Kesepahaman antara KPK dan ACRC Korea Selatan tentang Kerjasama Dalam Pemberantasan Korupsi<br>30. Nota Kesepahaman antara KPK dan ICAC Mauritius<br>31. Nota Kesepahaman antara KPK – RRI<br>32. Nota Kesepahaman antara KPK – TVRI<br>33. Nota Kesepahaman antara KPK – BPJS Ketenagakerjaan<br>34. Evaluasi Nota Kesepahaman antara KPK – IDI<br>35. Amandemen Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KPK – BRI Kartu Kredit<br>36. MoU antara KPK dan Muhammadiyah Surabaya tentang kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi<br>37. MoU antara KPK dan Unisba Bandung tentang kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi<br>38. MoU antara KPK dan BKPM tentang kerjasama dalam upaya pencegahan tindak pidana korupsi<br>39. MoU antara KPK dan Bank Indonesia tentang kerja sama dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi.<br>40. MoU antara KPK dengan Ombudsman tentang kerjasama dalam rangka optimalisasi dalam upaya pemberantasan kourpsi dan pengawasan penyelenggaran pelayanan publik<br>41. Perjanjian Kerja sama KPK dengan Badan Pendapatan Daerah Pemrov Sumsel. |
| 4 | Penanganan Perkara (Litigasi) | 1. Sidang Praperadilan No. 1/Pid.Pra/2018/PN.Kln (menang)<br>2. Sidang Praperadilan No.12/Pid.Pra/2018/PN.JKT.PST (menang)<br>3. Sidang Praperadilan No. 42/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel (menang)<br>4. Sidang Praperadilan No. 37/Pid.Pra/2018/PN Jkt.Sel (menang)<br>5. Sidang Praperadilan No. 9/Pid.Pra/2018/PN JakSel (cabut) |

| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| | | 6. Sidang Praperadilan No. 11/Pid.Pra/2018/PN JakSel (cabut)<br>7. Sidang Praperadilan No. 24/Pid.Pra/2018/PN Jaksel (kalah)<br>8. Sidang Praperadilan No. 23/Pid.Pra/2018/PN Jaksel (menang)<br>9. Sidang Praperadilan No. 34/Pid.Pra/2018/PN Jaksel (menang)<br>10. Sidang Praperadilan No. 49/Pid.Pra/2018/PN Jkt Sel (menang)<br>11. Sidang Praperadilan No. 51/Pid.Pra/2018/PN Jkt Sel (menang)<br>12. Sidang Praperadilan No. 14/Pid.Pra/2018/PN.Plg (menang)<br>13. Sidang Praperadilan No. 71/Pid.Pra/2018/PN Jkt Sel (menang)<br>14. Sidang Praperadilan No. 35/Pid.Pra/2018/PN.Medan (menang)<br>15. Sidang Praperadilan No. 83/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (menang)<br>16. Sidang Praperadilan No. 95/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (menang)<br>17. Sidang Praperadilan No. 96/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (menang)<br>18. Sidang Praperadilan No. 97/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (menang)<br>19. Sidang Praperadilan No. 104/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Menang)<br>20. Sidang Praperadilan No. 119/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. (Menang)<br>21. Sidang Praperadilan No. 130/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (dicabut)<br>22. Sidang Praperadilan No. 133/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Menang)<br>23. Sidang Praperadilan No. 16/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst. (Proses)<br>24. Sidang Praperadilan No. 18/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Pst. (Proses)<br>25. Sidang Praperadilan No. 138/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel. (Proses)<br>26. Sidang Praperadilan No. 127/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Proses)<br>27. Sidang Praperadilan No. 139/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Proses)<br>28. Sidang Praperadilan No 140/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Proses)<br>29. Sidang Praperadilan No. 144/Pid.Pra/2018/PN.Jkt.Sel (Proses)<br>30. Sidang Gugatan Perdata No: 198/Pdt.G/2017/PN. Pbr (dicabut)<br>31. Sidang Gugatan Perdata No: 346/Pdt.G/2017/PN. Jkt. Pus (proses)<br>32. Sidang Gugatan Perdata No: 470/Pdt.G/2017/PN.SBY (menang)<br>33. Sidang Gugatan Perdata No: 201/Pdt.G/2017/PN.Plg (menang) |





| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| | | 34. Sidang Gugatan Perdata No: 786/Pdt.G/2017/PN.Jkt.Sel (menang)<br>35. Sidang Gugatan Perdata No. 39/Pdt.G/2018/PN Pya (proses)<br>36. Sidang Gugatan Perdata No. 150/Pdt.G/2018/PN Jkt.Tim (dicabut)<br>37. Sidang Gugatan Perdata No. 110/Pdt.G/2018/PN Jkt.Pst (proses)<br>38. Sidang Gugatan Perdata No. 97/Pdt.G/2018/PN.Plg (menang)<br>39. Sidang Gugatan Perdata No.3/Pdt.Kas/2018/PN Skt (proses)<br>40. Sidang Gugatan Perdata No. 412/Pdt.G/2018/PN Jkt Sel (proses)<br>41. Sidang Gugatan Perdata No. 370/Pdt.G/2018/PN.Tgr (proses)<br>42. Sidang Gugatan Perdata No.382/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel (proses)<br>43. Sidang Gugatan Perdata No. 42/Pdt.G/2018/PN.Bkn (proses)<br>44. Sidang Gugatan Perdata No. 311/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel (proses)<br>45. Sidang Gugatan Perdata No. 97/Pdt.G/2018/PN.Plg (menang)<br>46. Sidang Gugatan Perdata No. 786/Pdt.G/2017/PN Jaksel (menang)<br>47. Sidang Gugatan Perdata No. 126/Pdt.G/2018/PN.Plg (menang)<br>48. Sidang gugatan perdata No. 638/Pdt.G/2018/PN.Tgr. (Proses)<br>49. Sidang gugatan perdata No. 190/Pdt.G/2018/PN.Tjk. (Proses)<br>50. Sidang Gugatan Perdata (Banding) No: 42/Pdt.G/2016/ PN.Pkl (menang)<br>51. Sidang Gugatan Perdata (Banding) No: 120/Pdt.G/2016/ PN.Bkn (menang)<br>52. Sidang Gugatan Perdata (Banding) No: 429/Pdt.G/2017/ PN.Sby (proses)<br>53. Sidang Gugatan Perdata (Banding) No: 129/Pdt.G/2016/ PN Skt (menang)<br>54. Sidang Gugatan Perdata (Banding) No: 09/Pdt.G/2016/ PN.Pwk (Menang)<br>55. Sidang Gugatan Perdata (banding) No. 224/Pdt.G/2017/ PN.Pbr (proses)<br>56. Sidang Gugatan Perdata (banding) No. 296/PDT/2018/PT DKI (proses)<br>57. Sidang Gugatan Perdata Intervensi No. 47/Pdt.G/ LH/2018/PN.Cbi (proses)<br>58. Sidang Gugatan Perdata Intervensi No. 252/Pdt.G/2018/ PN.Jkt.Tim (permohonan intervensi ditolak)<br>59. Sidang Gugatan PTUN (Banding) No: 206/G/2017/PTUN-JKT (Menang)<br>60. Sidang Keberatan Perkara No. 01/ Pid.Sus/ Keberatan/ TPK/ 2017/ PN. Jkt. Pst; atas nama Mulya Hasjmy dengan pemohon PT. Indofarma Global Medica (Menang) |

| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| 5 | Pemenuhan Bantuan Hukum di Luar persidangan (Non Litigasi) | 1. Pendampingan hukum dalam pemeriksaan oleh Penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya terhadap Pegawai Biro SDM KPK sebagai saksi terkait perkara Penyidik KPK Gadungan.<br>2. Pemberian bantuan hukum untuk berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor KEP: 422 A Tahun 2018.<br>3. Pendampingan hukum dalam pemeriksaan etik Pegawai KPK.<br>4. Pendampingan hukum dalam pemeriksaan oleh Komnasham terhadap Pegawai KPK.<br>5. Pendampingan hukum pegawai KPK dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat.<br>6. Pemberian bantuan hukum untuk Tersangka ES (selesai di Januari 2018)<br>7. Pemberian bantuan hukum untuk Tersangka R (selesai di Januari 2018)<br>8. Pemberian bantuan hukum berdasarkan Keputusan Nomor KEP: 981 Tahun 2018.<br>9. Pemberian bantuan hukum berdasarkan Keputusan KEP: 982 Tahun 2018.<br>10. Pemberian bantuan hukum berdasarkan Keputusan Nomor KEP: 1038 Tahun 2018.<br>11. Pendampingan hukum pegawai KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan oleh Direktorat Reserse criminal Polda Jabar.<br>12. Pendampingan hukum Pegawai KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan oleh Direktorat Reserse criminal Khusus Polda Metro.<br>13. Pendampingan hukum pegawai KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan oleh Direktorat Reserse criminal Khusus Polda Metro Jaya.<br>14. Pendampingan hukum Pegawai KPK sebagai saksi dalam pemeriksaan oleh Direktorat Reserse criminal Khusus Polda Metro Jaya.<br>15. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 98 Tahun 2018.<br>16. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 99 Tahun 2018.<br>17. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 273 Tahun 2018.<br>18. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 778 Tahun 2018.<br>19. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 347 Tahun 2018.<br>20. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 575 Tahun 2018.<br>21. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 1118 Tahun 2018. |





| NO | KEGIATAN | URAIAN |
|---|---|---|
| | | 22. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 1815 Tahun 2018<br>23. Pemberian Bantuan Hukum perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 1855 Tahun 2018.<br>24. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 569/01-55/05/2017.<br>25. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 1092 Tahun 2017.<br>26. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 006/01-55/01/2016.<br>27. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 005/01-55/01/2016.<br>28. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 734/01-55/06/2016.<br>29. Pemberian Bantuan Hukum Perlindungan saksi, berdasarkan Keputusan Pimpinan Nomor 212/01-55/03/2015. |